

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berhasil atau tidaknya suatu penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat bagaimana kinerja keuangan daerah. Menurut Rai (2008) pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja pada sektor publik diperlukan untuk menilai apakah pemerintah daerah sudah mampu mengelola keuangannya secara efektif.

Efektivitas keuangan suatu daerah merupakan kesesuaian dari capaian hasil kinerja keuangan dengan target yang telah direncanakan. Menurut Mahmudi (2019) salah satu indikator untuk pengukuran kinerja keuangan daerah dengan rasio efektivitas yang diukur dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Ayu (2018) pemerintah daerah dikatakan berhasil jika bisa merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Saputro (2014) salah satu hal yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan otonomi

Menurut Antari & Sedana (2018) belanja daerah juga ikut andil dalam memperoleh pendapatan daerah yang berasal dari potensi-potensi yang dimiliki daerah. Menurut Halim (2007) belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial untuk memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sementara belanja langsung adalah belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan yang terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (Halim, 2006). Menurut Antari & Sedana (2018) salah satu kegiatan belanja modal yang menghasilkan sumber-sumber keuangan yaitu pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum. Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu memberikan efektifitas terhadap penerimaan pendapatan daerah. Bertambahnya aset daerah yang diperoleh dari belanja modal diharapkan dapat meningkatkan efektifitas kinerja daerah.

Beberapa wilayah di Indonesia belum bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah karena tidak bisa mengidentifikasi potensi daerah secara menyeluruh. Namun Kabupaten Ponorogo terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata positif. Berikut pergerakan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2021 :



(Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kab. Ponorogo Tahun 2010 -2021)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan salah satunya akibat adanya revitalisasi pasar tradisional dari tahun 2016. Sebanyak 10 pasar tradisional di Ponorogo pada tahun 2016 dan 2 pasar ditahun 2017 telah direvitalisasi. Berdasarkan berita dari koranmemo.com (<https://koranmemo.com/belasan-pasar-tradisional-rampung-revitalisasi/> diakses pada Februari 2021) revitalisasi pasar ini juga berimbas pada naiknya target penerimaan PAD pada sektor ini dari Rp 2,4 miliar ditahun 2016 menjadi Rp 2,6 miliar ditahun 2017. Berdasarkan berita tersebut belanja modal yang dikelola dengan baik akan berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Revitalisasi pasar

yang dilakukan akan berdampak positif untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada retribusi daerah. Selain retribusi daerah, salah satu sumber PAD juga berasal dari Pajak Daerah.

Beberapa penelitian terkait dengan faktor-faktor kinerja keuangan daerah, diantaranya penelitian Hardi & Asnidar (2019) dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian Azhar (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian Haryanto & Lathifa (2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengukuran kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini menggunakan rasio efektivitas PAD karena rasio ini lebih menjelaskan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerimaan PAD. Penelitian ini merupakan kompilasi dengan mengkombinasikan dua variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah dari penelitian Azhar (2021) dan Belanja Modal dari peneliti Hardi & Asnidar (2019). Menurut Azhar (2021) pengukuran kinerja keuangan daerah perlu memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah. Kombinasi yang dimaksudkan adalah untuk membuktikan bagaimana variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpotensi mempengaruhi tingkat efektivitas PAD.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka peneliti mengambil judul tentang **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2010 - 2021”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2021 ?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2021 ?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2021 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2021
- b. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2021
- c. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Ponorogo tahun 2010 – 2021

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak berikut ini :

a. Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan literatur yang dapat dijadikan bahan referensi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan, serta dapat menambah rujukan bagi peneliti yang akan datang.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan Badan Pengelola, Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo bisa menjadikan penelitian ini sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

c. Peneliti

Penelitian ini sangat berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti.

d. Penelitian Yang Akan Datang

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan atau referensi oleh peneliti selanjutnya, sehingga dapat menambah dan menyempurnakan penelitian ini.